

Pemkab Dorong MBG Gandeng UMKM



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*

Jumat, 17/01/2025

DI Kabupaten Berau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga belum berjalan. Meski demikian Diskoperindag Berau mengaku telah mendengar arahan untuk penyediaan pangan melalui UMKM Berau.

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Hidayat Sorang pihaknya memang sudah mendengar arahan tersebut. Sebab itu, pihaknya mendorong agar UMKM di Berau dapat naik kelas. Naik kelas yang dimaksud adalah UMKM yang memiliki syarat administratifnya.

"Memang pemerintah meminta untuk penyediaan makan bergizi gratis melalui UMKM Berau. Walaupun belum kami ketahui juga dari pihak mana yang menjalankan program nantinya," jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (15/1/2025).

Menurut pihaknya, nanti UMKM yang memiliki syarat dokumen seperti PIRT dapat memasukkan produknya di e-katalog. "Nanti siapa yang UMKM produknya di e-katalog dapat kesempatan untuk memaparkan produknya," ungkapnya.

"Misalkan jual bumbu, itu bisa juga dimasukkan ke e-katalog, tinggal penyedia saja yang memilih yang mana," tutupnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Pemkab Dorong MBG Gandeng UMKM, 17/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan,

- pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.